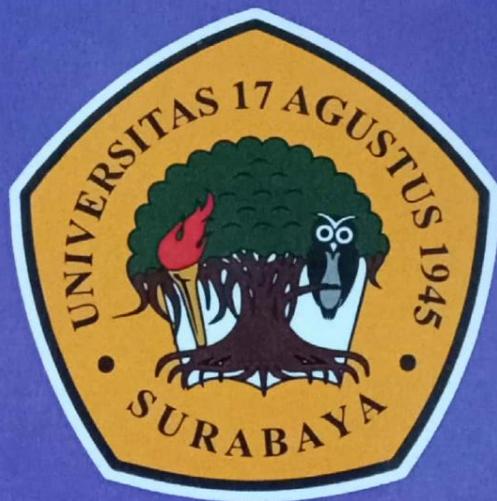


TESIS

**IMPLEMENTASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA PROSES
PELAYANAN DI KABUPATEN TUBAN**



Oleh :

AGUS SUSENO
NIM : 1161700021

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**IMPLEMENTASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA PROSES
PELAYANAN DI KABUPATEN TUBAN**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi
Dalam Program Studi Administrasi**



Oleh :

**AGUS SUSENO
NIM. 1161700021**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
SURABAYA
2019**

**IMPLEMENTASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA PROSES
PELAYANAN DI KABUPATEN TUBAN**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Administrasi**



Oleh :

**AGUS SUSENO
NIM. 1161700021**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
SURABAYA**

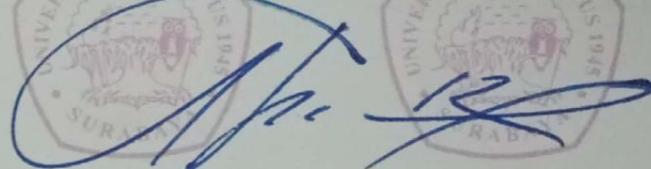
2019

Lembar Pengesahan

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL, 27 Juli 2019**

Oleh :

1. Pembimbing I Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS.
NPP. 20110860062



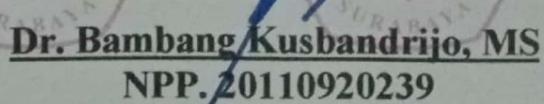
2. Pembimbing II Dr. Achluddin Ibnu Rochim, SH., M.Si.
NPP. 20110960463

Mengetahui
Dekan

Menyetujui
Kaprodi Magister Ilmu
Administrasi



Dr. Endro Tjahjono, MM
NPP. 20120880138



Dr. Bambang Kusbandrijo, MS
NPP. 20110920239

**TELAH DITETAPKAN PANITIA PENGUJI TESIS
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
PADA TANGGAL, 3 AGUSTUS 2019**

Panitia Penguji

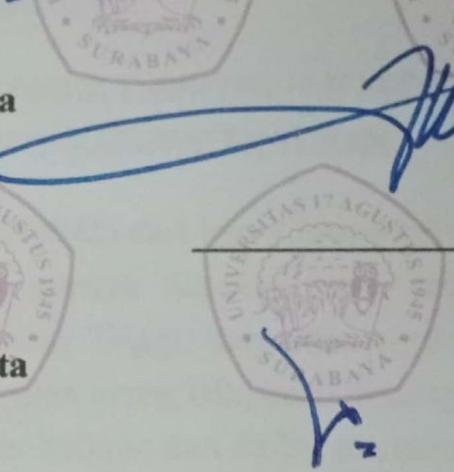
Ketua

Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS
NPP. 20110860062



Anggota

Dr. H. Ach Sjafi'I, SH., M.Si
NPP. 20110890171



Anggota

Dr. Sukarno Hardjosoevito, M.Si
NPP. 2011K.17.0739



Mengetahui

Dekan

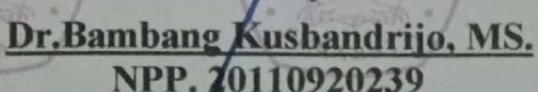
Dr. Endro Tjahjono, MM
NPP. 20120880138



Menyetujui

**Kaprodi Magister
Admisisitrasi**

Dr. Bambang Kusbandrijo, MS.
NPP. 20110920239



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NIM :

1	1	6	.	1	7	0	.	0	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NAMA : AGUS SUSENO

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Menyatakan bahwa TESIS yang saya buat dengan judul:

IMPLEMENTASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA PROSES PELAYANAN DI KABUPATEN TUBAN

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan DUPLIKASI dari karya orang lain. Dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah di dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanda ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, Agustus 2019



**AGUS SUSENO
NBI : 116.170.0021**



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SUSENO
NBI : 116.170.0021
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial Politik (FISIP)
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi
Jenis Karya : Tesis

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)** karya ilmiah saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA PROSES PELAYANAN DI KABUPATEN TUBAN

Dengan **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : Agustus 2019



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun tesis yang berjudul "**Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pada Proses Pelayanan Di Kabupaten Tuban**" ini dengan tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gelar Magister Administrasi dalam Program Studi Administrasi.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mengalami kesulitan, terutama disebabkan oleh ilmu pengetahuan yang penulis miliki sangat kurang. Akan tetapi, berkat bimbingan dari berbagai pihak, tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, semua dosen dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis juga menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik maupun saran yang positif agar tesis ini dapat menjadi lebih baik lagi.

Harapan penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, rekan mahasiswa, serta masyarakat umum. Amin.

Tuban, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENETAPAN PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Kegunaan Ilmiah	5
1.4.2 Kegunaan Praktis	6

BAB II. LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu	7
2.2. Critical Review	30
2.3. Landasan Teori.....	32
2.3.1. Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)	32
2.3.2. Pelayanan Publik.....	36
2.3.3. Kebijakan Publik.....	38
2.3.3.1. Pengertian Kebijakan Publik	38
2.3.3.2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik	40
2.3.4. Implementasi Kebijakan Publik	42
2.3.5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	44
2.3.6. Kerangka Berpikir.....	45

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	47
3.2. Obyek Penelitian	48
3.3. Informan Penelitian.....	48
3.4. Definisi Operasional	49
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.5.1 Pengumpulan Data	49
3.5.2 Jenis Data	51
3.5.3 Keabsahan Data.....	51
3.6. Metode Analisis Data.....	52

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	54
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Tuban.....	54
4.1.1.1 Aspek Geografis.....	54
4.1.1.2 Aspek Demografi	55

4.1.1.3 Keuangan dan Perekonomian Daerah	57
4.1.1.4 Kelembagaan Pemerintah Daerah	59
4.1.2 Profil Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja.....	61
4.1.2.1 Visi, dan Misi DPM, PTSP dan Naker.....	62
4.1.2.2 Tujuan DPM, PTSP dan Naker Kabupaten Tuban	63
4.1.2.3 Sasaran	63
4.1.2.4 Strategi DPM, PTSP dan Naker Kabupaten Tuban	64
4.1.2.5 Sumber Daya Manusia (SDM) DPM, PTSP dan Naker	64
4.1.2.6 Struktur Organisasi.....	65
4.2. Penyajian Data Penelitian	67
4.2.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018.....	67
4.2.1.1 Jenis, Pemohon dan Penerbit Perizinan Berusaha	67
4.2.1.2 Pelaksanaan Perizinan Berusaha	68
4.2.1.3 Reformasi Perizinan Berusaha Sektor.....	71
4.2.1.4 Sistem OSS.....	72
4.2.1.5 Lembaga OSS.....	72
4.2.1.6 Insentif atau Disinsentif Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui OSS	73
4.2.1.7 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Berusaha Melalui OSS	73
4.2.1.8 Sanksi	74

4.2.2 Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 di Kabupaten Tuban.....	74
4.2.2.1 Kekuasaan	75
4.2.2.2 Kepentingan	77
4.2.2.3 Strategi	79
4.2.2.4 Karakter	83
4.2.2.5 Kepatuhan.....	84
4.2.2.6 Respon.....	85
4.2.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	87
4.2.3.1 Faktor Pendukung	87
4.2.3.2 Faktor Penghambat	89
4.3. Pembahasan.....	90
4.3.1 Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kabupaten Tuban.....	90
4.3.1.1 Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi	93
4.3.1.2 Karakteristik	96
4.3.1.3 Kepatuhan dan Respon	96
4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	97
4.3.2.1 Faktor Pendukung	97
4.3.2.2 Faktor Penghambat	99
4.3.3 Model Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kabupaten Tuban.....	100

BAB V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan	102
5.2. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

	104
--	-----

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Akhir Tahun Kabupaten Tuban Menurut Jenis Kelamin Hasil Registrasi.....	56
Tabel 4.2 PDRB Kabupaten Tuban atas ADHB Tahun 2017	57
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal, PTSP dan TenagaKerja Kabupaten Tuban berdasarkan Jenis Kelamin.....	65
Tabel 4.4 Data Perkembangan Izin Usaha Tahun 2017-2018....	88

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Berpikir Penelitian 46
Gambar 4.1	Peta Wilayah Kabupaten Tuban 55
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban 60
Gambar 4.3	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban 66
Gambar 4.4	Model Implementasi Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik di Kabupaten Tuban 101

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 merupakan dasar hukum dalam melayani perizinan berusaha I Kabupaten Tuban. Pemerintah Kabupaten Tuban berkomitmen dalam perbaikan pelayanan publik khususnya dalam pelayanan perizinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kabupaten Tuban berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dalam pelayanan perizinan di Kabupaten Tuban serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban dengan informan pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan langkah-langkah yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam pelayanan perizinan telah berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan jumlah izin berusaha pada dari tahun 2017 sampai akhir tahun 2018. Adapun faktor pendukung implementasi kebijakan ini yaitu adanya sosialisasi perizinan, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, respon dari pemerintah Kabupaten Tuban. Sedangkan Faktor penghambatnya adalah kuantitas sumberdaya manusia yang masih kurang, dukungan anggaran yang belum maksimal. Tetapi faktor penghambat tersebut tidak berpengaruh terhadap proses pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Saran dari hasil penelitian ini adalah menambah jumlah petugas pelayanan perizinan, perlunya menambah sosialisasi sehingga mampu tersebar ke semua wilayah di Kabupaten Tuban serta menambahkan anggran dalam kegiatan sosialisasi dan kegiatan penyebarluasan informasi perizinan agar lebih diketahui masyarakat Kabupaten Tuban dan mendukung pelayanan perizinan.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pelayanan Perizinan

ABSTRACT

Government Regulation Number 24 of 2018 is the legal basis in serving business licensing I of Tuban Regency. The Tuban Regency Government is committed to improving public services, especially in licensing services. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of Integrated Electronic Licensing Business Services in Tuban Regency based on Government Regulation Number 24 Year 2018 in licensing services in Tuban Regency and identify supporting factors and inhibitors.

This research is a qualitative descriptive study, carried out at the Investment Office, One-Stop Integrated Services and Tuban Regency Workers with staff informants of the Investment Office, One-Stop Integrated Services and Manpower in Tuban Regency, using qualitative data analysis techniques with steps namely data reduction, data display and conclusion.

The results showed that the implementation of the Integrated Electronic Licensing Business Services in licensing services had gone well and was able to increase the number of business permits from 2017 to the end of 2018. The supporting factors for implementing this policy were licensing socialization, availability of adequate facilities and infrastructure , response from the government of Tuban Regency. While the inhibiting factor is the quantity of human resources that are still lacking, budget support that has not been maximized. But the inhibiting factor does not affect the process of licensing services trying to be integrated electronically.

Suggestions from the results of this study are to increase the number of licensing service officers, the need to increase socialization so that it is able to spread to all regions in Tuban Regency and add permits to dissemination and dissemination of information on licensing activities so that the Tuban Regency is better known and supports licensing services.

Keywords: Implementation, Policy, Licensing Services